

BAB II

POSISI POLITIS FINLANDIA DI EROPA

2.1 Hubungan Finlandia Dengan Eropa Barat

Sejarah hubungan Finlandia dengan Eropa Barat dimulai sejak kedatangan Swedia pada abad ke-13. Pada masa itu, Finlandia berada di bawah kekuasaan Kerajaan Swedia yang juga membawa misi penyebaran agama Kristen. Kedatangan Swedia menandai awal kerjasama Finlandia dengan negara-negara Eropa Barat. Pada tahun 1809, Finlandia diserahkan kepada Kekaisaran Rusia. Namun, pada tahun 1917, selama Revolusi Rusia, Finlandia berhasil memperoleh kemerdekaannya. Sejak itu, Finlandia menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa Barat yang diakui secara internasional²⁶.

Selama Perang Dunia Ke II telah memberikan dampak buruk kepada di Kawasan Eropa termaksud negara Finlandia itu sendiri, yang berperang melawan Uni Soviet demi mempertahankan Kemerdekaannya, Meskipun hasil dari perang dari kedua negara ini, Finlandia dirugikan yaitu kehilangan sebagian wilayah Karelia²⁷, pasca berakhirnya perang dunia ke 2 berakhir, Negara Finlandia menjaga hubungan baik bersama dengan negara-negara Eropa Barat, meskipun mereka posisinya sebagai negara netral. Finlandia beragabung menjadi anggota Dewan Nordik pada tahun 1952²⁸, dan juga memperkuat hubungannya dengan

²⁶ 'Finland - Swedish Rule, Sovereignty, Independence | Britannica' <<https://www.britannica.com/place/Finland/Finland-under-Swedish-rule>> [accessed 2 August 2024].

²⁷ Fransindhu Njoo, 'Peranan Adolf Hitler Dalam Perang Dunia Ii 1939-1945', *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Lmx, 2018, 116–22.

²⁸ 'Finland (06/02)' <<https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/finland/25852.htm>> [accessed 5 March 2024].

negara-negara yang berada Skandinavia dan Islandia. Tetapi negara Finlandia tetap berkomitmen menjadi negara Demokrasi yang merdeka dan sekaligus Negara Netral Kawasan Eropa.

Negara Finlandia resmi bergabung menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 14 Desember tahun 1955. Keanggotannya di dalam Perserikatan Bangsa-bangsa negara Finlandia merupakan bagian untuk memperkuat posisi serta keterlibatannya dalam komunitas internasional pasca selesai perang dunia ke II²⁹, Finlandia memiliki alasan utama untuk bergabung PBB yaitu menjadi juru perdamaian dunia, tanggung jawab dalam isu global. Seperti terjadi pada tahun 1963, Finlandia pernah ditunjuk menjadi peacemaker, yang dimana sebagai mediasi konflik yang terjadi antara Turkiye dan Yunani³⁰. Dan sampai sekarang Finlandia dipercaya oleh dewan PBB untuk menjadi dewan perdamaian.

Pada tanggal 4 Mei 1960 negara Finlandia pernah bergabung dengan organisasi *European Free Trade Association*(EFTA) pada saat itu menjadi asosiasi, dan menjadi anggota penuh resmi pada tahun 1986. EFTA sendiri merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1960 oleh beberapa negara eropa yang ingin menciptakan area perdagangan bebas terhadap kawasan yang berada di eropa barat dan berfungsi sebagai blok perdagangan alternatif terhadap kawasan bagian eropa yang tidak mampu atau tidak mau bergabung terhadap komunitas

²⁹ 'The United Nations - Ministry for Foreign Affairs' <<https://um.fi/the-united-nations>> [accessed 23 March 2024].

³⁰ K.M Fitri, 'Identitas Finlandia Sebagai PeaceMaker BAB III', 2017, 49–63.

Ekonomi eropa (EEC)³¹. Semenjak bergabungnya negara Finlandia kedalam anggota EFTA telah terjadi sebagian upaya negara anggota untuk memperluas kerjasama ekonomi dalam tingkat regional dan global serta memberikan dampak, yaitu memberikan akses pasar bebas terhadap negara-negara Anggotanya dalam meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi dengan mitra-mitra EFTA dan menguntungkan bagi pemerintah Finlandia dari segi ekonomi. Negara Finlandia berhenti menjadi anggota tetap dari organisasi EFTA dikarenakan mereka bergabung dengan organisasi Uni Eropa yang terjadi pada tahun 1995 bersama dengan negara Swedia dan Austria³².

Pada Tahun 28 Januari 1969, Negara Finlandia bergabung dengan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), adalah sebuah Organisasi internasional yang mempromosikan kordinasi atau kebijakan kebebasan ekonomi negara-negara maju, OECD didirikan pada tahun 1948 yang awalnya untuk memantau kontribusi Amerika dan Canada berdasarkan Marshall Plan. Tujuan dibentuknya dari Organisasi ini untuk meningkatkan perekonomian global serta mendorong perdagangan dunia, Hal ini dapat memberikan jalan keluar terhadap pemerintah dari berbagai negara untuk melakukan Kerjasama serta mencari solusi permasalahan Bersama yang mencakup dengan negara negara-negara demokratis yang mempunyai komitmen yang sama untuk

³¹ 'European Free Trade Association (EFTA) - EUR-Lex' <<https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/glossary/european-free-trade-association-efta.html>> [accessed 25 March 2024].

³² 'EFTA through the Years | European Free Trade Association' <<https://www.efta.int/About-EFTA/EFTA-through-years-747>> .

meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara universal³³. Dengan alasannya Negara Finlandia bergabung dengan OECD yaitu, untuk mendapatkan Akses dan informasi terkait kebijakan public dari negara anggotanya, yang dimana dapat membantu Finlandia dalam merancang kebijakannya lebih efisien di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan bergabungnya OECD Finlandia dapat terlibat dalam Kerjasama ekonomi serta pembangunan secara international lebih luas. Sebagai bagian dari OECD, Finlandia dapat berpartisipasi dalam mengenai diskusi dan pengambilan keputusan terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan international, ketimpangan ekonomi, dan inovasi teknologi.

Finlandia pernah juga bergabung dengan NATO tapi sebagai anggota *partnership for peace*(PfP) pada tahun 1994. *Program partnership for Peace* merupakan inisiatif NATO untuk meningkatkan kerjasama antara NATO dan negara mitra di eropa, terutama di wilayah eropa Timur dan Tengah. Sebagai anggota PfP, Finlandia memiliki Kerjasama dengan NATO dalam berbagai bidang, termasuk pertukaran informasi keamanan, pelatihan militer, Latihan Bersama, dan Kerjasama dalam penanganan krisis. Finlandia pada saat itu bukan salah menjadi anggota penuh dari NATO, tetapi melalui PfP, Negara ini terlibat dalam aktivitas dan proyek Kerjasama dengan aliansi³⁴. Keanggotan Finlandia dalam PfP mencerminkan komitmen negara Finlandia untuk memperkuat hubungan keamanan kebijakan netralitasnya. Finlandia juga menjalin Kerjasama

³³ 'Organisation for Economic Co-Operation and Development OECD' <<https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/oecd/>> [accessed 25 March 2024].

³⁴ 'Fact Sheet: NATO Partnership for Peace (6/19/97)' <https://1997-2001.state.gov/regions/eur/nato_fs-pfp.html> [accessed 9 May 2024].

keamanan regional melalui Dewan Nordik, OSCE(Organisasi untuk keamanan dan Kerjasama di Eropa), dan organisasi international lainnya.

Negara Finlandia telah melakukan langkah besar dalam melakukan integrasi Ekonomi Eropa, yaitu dengan terlibatnya dalam *European Economic Area* (EEA). sebagai anggota dari EEA yang juga berdirinya kesepakatan pada tahun 1994, Finlandia ikut turut dalam berpartisipasi pasar tunggal eropa tanpa harus menjadi anggota penuh Eropa. European Economic Area sendiri merupakan kesepakatan yang menciptakan wilayah mengenai pasar tunggal antara negara-negara anggota Uni Eropa(UE) dan negara non-UE, yaitu seperti Islandia, Liectenstein, dan Norwegia. EEA sendiri ini diciptakan melalui perjanjian dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari tahun 1994. Tujuan utama dari EEA untuk menciptakan sebuah wilayah ekonomi yang bebas, dimana perdagangan barang, Jasa, Modal, dan tenaga kerja dapat bergerak bebas diantara negara anggotanya, Keuntungan utama bagi negara yang menjadi anggota EEA mereka dapat mengakses pasar tunggal UE tanpa harus menjadi anggota penuh dari UE³⁵, Namun, sebagai imbalannya, negara tersebut harus menerima Sebagian besar dari regulasi pasar tunggal dan kebijakan dari Uni Eropa tanpa memiliki pengaruh langsung dalam proses pembuatan keputusan. Sebagai anggota dari EEA, Finlandia memiliki tanggung jawab penuh untuk mematuhi regulasi dan kebijakan pasar tunggal yang ditetapkan oleh Uni Eropa, sambil mempertahankan kedaulatannya dalam beberapa kebijakan domestik. Dalam keanggotanya negara Finlandia dalam EEA tidak juga serta merta menguntungkan mereka dari segi akses pasar dan investasi,

³⁵ Main Part, 'Agreement on the European Economic Area', *Agreement on the European Economic Area*, 2021 (2018), 1–41 <<https://doi.org/10.5771/9783845275796>>.

tetapi juga memperkuat keterlibatannya dalam kerangka Kerjasama lintas negara yang lebih luas di eropa, dalam mendukung ekonomi dan stabilitas regional.

Konsep yang diterapkan oleh *Euorepan Economic Area* telah mendapatkan perhatian dan serta juga dukungan di negara Finlandia, dan banyak yang berpendapat bahwa dari konsep tersebut sangat ideal terhadap negaranya, akan tetapi ada dua insiden yang mengarahkan Finlandia mengarahkan menuju jalur untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pertama, Pamerintah Finlandia terkejut, disebabkan negara tetangganya yaitu Swedia telah memutuskan duluan untuk pengajuan masuk ke dalam organisasi Uni Eropa pada bulan oktober 1990, Hal ini memulai diskusi serius tentang masa depan Finlanndia seandainya perbatasan timur komisi eropa berada di swedia dan Finlandia. Kedua mengenai upaya kudeta yang gagal di moskow pada tahun 1991, negara-negara baltik Kembali memperoleh kemerdekaannya, dan Uni Soviet dibubarkan, Perjanjian Lama antara Finlandia dan Uni Soviet yang dibuat pada tahun 1948 tidak lagi berlaku³⁶, Sehingga negara Finlandia mereka bebas dalam mencari solusi politik keamanan, yang tentu saja, pertimbangan keamanan menjadi latar belakang Ketika Finlandia mengajukan permohonan pada komisi pada tahun 1992. Akan tetapi, Pamerintah Finlandia dengan hati-hati menghindari diskusi publik mengenai masalah dalam proses akses, sementara implikasi lain dari keanggotaan tersebut dibahas secara luas, mulai dari pertanian, kehutanan, seolah-olah Finlandia adalah negara agraris.

³⁶ 'EU-Finland, First-Year Impressions' <<https://aci.pitt.edu/828/1/2.htm>> [accessed 13 March 2024].

Proses negara Finlandia sebagai anggota Uni Eropa dimulai beberapa tahun sebelumnya, atau lebih tepatnya pada tahun 1992, pada saat itu negara Finlandia mengajukan sebuah permohonan untuk bergabung sebagai anggota Uni Eropa, Setelah itu selesai serangkaian tahap evaluasi dan negosiasi yang Panjang, akhirnya Secara resmi Negara Finlandia diterima sebagai anggota Bersama tetangganya yaitu Swedia dan Austria pada tahun 1995. Dengan bergabungnya Finlandia kedalam UE telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian, Politik, dan kebijakannya Domestik maupun International. Sebagai anggota UE, Finlandia ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan regulasi Uni Eropa serta memperoleh akses lebih mudah ke dunia pasar tunggal UE dan meningkatkan Kerjasama dengan negara eropa lainnya dalam bidang seperti perdagangan, Investasi, Lingkungan dan keamanan³⁷.

2.2 Hubungan Finlandia Dengan Rusia

Awal mula terjalinnya hubungan antara Finlandia sama Rusia sudah dimulai sebelum menjadi bagian dari Kekasarian Rusia. Pada awal abad ke-11, negara Finlandia berada di bawah kekuasaan kerajaan Swedia selama lebih 600 tahun. Selama itu telah terjadi perang antara Kerajaan Swedia dan Novogord yang nantinya menjadi negara Rusia Modern. Dampak dari perang antara Swedia dan Rusia pada abad ke-18 telah mempengaruhi posisi Finlandia secara signifikan³⁸. Perang utara Besar (1714-1721) dan Perang Rusia-Swedia (1788-1790) telah

³⁷ 'EU Membership Has Been Good for Finland - ICDS' <<https://icds.ee/en/eu-membership-has-been-good-for-finland/>> [accessed 19 March 2024].

³⁸ 'History of Finland | Flag, World War II, Maps, Sweden, & Russia | Britannica' <<https://www.britannica.com/topic/history-of-finland>> [accessed 30 May 2024].

menyebabkan wilayah Finlandia telah diduduki oleh Rusia dua kali³⁹. Sehingga hasil dari perang tersebut Rusia yang menang, jadi tidak secara langsung wilayah bekas jajahan dari Swedia diambil alih oleh pihak Rusia dan dibuatkan Perjanjian Fredrikshamn.

Perjanjian Fredrikshamn dikenal sebagai Perjanjian Hamina merupakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 17 September 1809 antara Kerajaan Swedia dan Kekaisaran Rusia. Perjanjian ini mengakhiri Perang Finlandia yang terjadi pada 1808-1809, merupakan bagian dari konflik lebih luas terkait perang Napoleon. Perjanjian tersebut dinamai sesuai dengan Kota Hamina. Di dalam isi perjanjian Fredrikshamn berisi tentang penyerahan wilayah Swedia kepada Rusia, termasuk Finlandia dan Kepulauan Aland. Dengan penyerahan ini, Finlandia menjadi bagian dari kekaisaran Rusia sebagai Kadipaten agung yang otonom, yang dikenal sebagai Grand Duchy Of Finland⁴⁰. Perjanjian ini telah membawa perubahan signifikan dalam politik dan geografis di Kawasan Finlandia. Bagi Swedia, Hilangnya Finlandia merupakan pukulan besar sebab Swedia sudah berabad-abad atas wilayahnya tersebut.

Finlandia menjadi bagian Keharyapatihan otonom di bawah Kekaisaran Rusia dari tahun 1809 yang diambil alih oleh tentara Aleksandr I. Pada masa tersebut, Negara Finlandia mempunyai status "*Grand Duchy Of Finland*" yaitu memiliki hak istimewa, seperti kebebasan Bahasa, iman Lutheran, dan Diet dan Estates Swedia, Finlandia memiliki beberapa gubernur jenderal yang nantinya akan

³⁹ 'Apakah Finlandia Pernah Menjadi Bagian Dari Rusia? - Russia Beyond' <<https://id.rbth.com/sejarah/82651-hubungan-rusia-dan-finlandia-wyx>> [accessed 29 May 2024].

⁴⁰ Petri Karonen, 'The Peace Treaty of Fredrikshamn and Its Aftermath in Sweden and Finland', *Sjuttonhundratalet*, 7 (2010), 168 <<https://doi.org/10.7557/4.2425>>.

mewakili daerahnya untuk Kekaisaran Rusia, Seperti Georg Sprengporten dan terakhir Nikolai Nekrasov⁴¹. Meskipun Finlandia berada di bawah kekuasaan Rusia, Finlandia mencapai status otonomi yang signifikan dan mampu melestarikan banyak institusi dan tradisi uniknya.

Namun akhir abad ke 19 dan awal abad ke 20, telah dibuatnya kebijakan Russifikasi yang bertujuan untuk memperkuat pengaruh Kekaisaran Rusia di wilayahnya dengan mengintegrasikan budaya, Bahasa, dan administrasi kekaisaran Rusia ke dalam masyarakat regional, termasuk Negara Finlandia. Kebijakan tersebut diprakasai oleh pemerintah Tsar Rusia sebagai bagian upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya serta membatasi wilayah otonomi non-Rusia dalam Kekaisaran Rusia. Dari kebijakan tersebut disini para pegawai negeri sipil daerah digantikan oleh warga negara Rusia, dan juga memperkenalkan Bahasa Rusia sebagai Bahasa resmi dalam pemerintahan dan Pendidikan serta membatasi penggunaan Bahasa dan budaya lokal⁴². Di Finlandia, kebijakan yang diterapkan sebagai bentuk penindasan terhadap Bahasa Finlandia dan Swedia yang secara tradisional digunakan oleh masyarakat Finlandia. Bahasa Rusia mulai diperkenalkan sebagai Bahasa pengantar kedalam sistem administrasi dan Pendidikan. Selain itu, Pemerintah Rusia berupaya untuk membatasi otonomi politik Finlandia dengan cara mengamandemen konstitusi Finlandia dan memperluas kekuasaan gubernur jenderal yang ditunjuk Rusia. Yang dimana

⁴¹ Jarosław Suchoples, 'In the Shadow of the Eastern Neighbour. Finland in the Security Policy of Russia and the Soviet Union from Peter the Great to Contemporary Times', *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 26.4 (2023), 9–38 <<https://doi.org/10.33067/se.4.2022.1>>.

⁴² 'Russification (History): Definition & Explanation | StudySmarter' <<https://www.studysmarter.co.uk/explanations/history/tsarist-and-communist-russia/russification/>> [accessed 4 June 2024].

reformasi bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan penting di Finlandia berada di tangan otoritas Rusia bukan di tangan otoritas lokal Finlandia.

Dari kebijakan tersebut, telah memberikan dampak besar pada masyarakat dan Politik Finlandia, yang dimana anak-anak Finlandia terpaksa menggunakan Bahasa Rusia, yang berujung penurunan kualitas Pendidikan bagi banyak siswa yang tidak fasih berbahasa Rusia. Hal ini juga telah mengancam kelangsungan Bahasa dan budaya terhadap negara Finlandia. Kemudian, penghapusan sistem otonomi Finlandia terhadap bidang politik yang menimbulkan rasa ketidakpuasaan yang meluas terhadap kalangan masyarakat Finlandia yang merasa identitas nasional mereka terancam kehilangan otonomi yang mereka nikmati selama bertahun-tahun. Kebijakan Russifikasi juga telah mempengaruhi ekonomi terhadap Finlandia⁴³, banyaknya orang Finlandia telah kehilangan pekerjaan mereka dikarenakan posisi mereka diambil alih orang-orang Rusia, hal itu telah membuat kalangan masyarakat Finlandia melakukan perlawanan terhadap kebijakan Russifikasi.

Reaksi perlawanan dari berbagai lapisan masyarakat di Finlandia, Banyaknya warga Finlandia melakukan Gerakan perlawanan yang bertujuan untuk mempertahankan identitas dan otonomi mereka. Gerakan nasionalis Finlandia semakin kuat. Meskipun menghadapi tekanan atau serta ancaman dari kekaisaran Rusia, perlawanan dari warga masyarakat Finlandia terus berlanjut dan bahkan semakin. Yang dimana pada Gerakan ini akhirnya berhasil menarik perhatian internasional dan mendapatkan simpati banyak dari banyak negara. Tekanan

⁴³ European Philosophical and Historical Discourse, 'A HISTORICKÝ DISKURZ', 5.3 (2019).

international dan perlawanan dari dalam negeri membuat pemerintah Rusia akhirnya harus mengendurkan kebijakan Russifikasi di Finlandia. Kebijakan ini justru memperkuat soal identitas nasional Finlandia serta mempererat solidaritas di antara rakyat Finlandia, Perlawanan terhadap kebijakan Russifikasi telah memainkan peran penting dalam proses menuju kemerdekaan Finlandia, yang akhirnya dicapai pada tahun 1917 setelah runtuhnya kekaisaran Rusia⁴⁴

Setelah berakhirnya kekaisaran Rusia, terjadinya perang saudara di Negara Finlandia yang terjadi pada tahun 1918. Perang tersebut tidak hanya meninggalkan luka mendalam pada bangsa Finlandia tetapi juga membentuk arah politik dan sosial. Perang Saudara Finlandia berakar pada ketegangan sosial, politik, dan ekonomi yang telah lama berkembang. Selama berabad-abad Finlandia merupakan bagian dari kerajaan Swedia, yang kemudian beralih kekaisaran Rusia setelah terjadinya perang Finlandia tahun 1809.

Pada awal abad ke-20, Negara Finlandia mengalami Industrialisasi sangat cepat, yang dimana urbanisasi dan perubahan sosial mengalami perubahan secara signifikan. Kelas pekerja dalam perkotaan mulai tumbuh dan juga kesadaran politik serta tuntutan akan reformasi sosial juga telah meningkat⁴⁵. Pada waktu yang bersamaan juga disini kelas menengah dan aristokrasi Finlandia, berusaha untuk mempertahankan *status quo* mereka. Ketegangan terjadi pada revolusi Rusia pada tahun 1917 yang dimana mengguncang fondasi kekaisaran Rusia dan memberikan kesempatan bagi negara Finlandia untuk mendeklarasikan

⁴⁴ A Masyhur Effendi, Fakultas Hukum, and Universitas Brawijaya, 'PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU', 8 (2011), 214–24.

⁴⁵ Petri Roikonen and Antti Häkkinen, 'Generations, Social Homogamy and Stratification in Finland, 1700–1910', *History of the Family*, 24.1 (2019), 67–93 <<https://doi.org/10.1080/1081602X.2018.1500295>>.

kemerdekaanya pada 6 desember 1917. Namun dalam kekacuaan yang ada dirusia juga menyebar ke negara Finlandia, kaum buruh pada saat itu semakin radikal yang dimana terinspirasi revolusi Bolshevik dan kaum konservatif yang ingin mempertahankan tatanan lama.

Di negara Finlandia telah terjadi perang saudara yaitu pasukan merah dan pasukan putih, pasukan merah terdiri dari kaum sosialis dari anggota serikat buruh, dan pendukung ide-ide revolusi sosial. Kaum sosialis ingin mendirikan finlandia sebagai negara sosialis dan ingin mengambil alih kekuasaan dari aristokrasi dan kelas menengah yang dianggap menindas, disini juga Pasukan merah mendapat dukungan dari Partai komunis Rusia yang berhasil menumbangkan kekaisaran Rusia dari revolusi Bolshevik⁴⁶. Di lain sisi, Pasukan Putih terdiri dari kaum konservatif, nasionalis, dan kelas menengah yang dipimpin oleh Carl Gustaf Emil Mannerheim yang ingin mempertahankan tatanan sosial yang ada. Pasukan Putih berusaha untuk menghapus pengaruh komunis dan Bolshevik dari Finlandia⁴⁷, pada saat itu mereka di dukung oleh negara Germany yang melihat kesempatan untuk memperluas pengaruhnya di wilayahnya.

Pada tahun 1918 perang saudara di Finlandia berakhir yang dimenangkan oleh Pasukan putih, kemenangan ini memberikan dampak signifikan terhadap politik Finlandia. Setelah terjadi kemenangan pasukan putih, pemerintah konservatif mengambil alih dalam kursi kekuasaan dan memulai upaya untuk memperkuat serta menuntaskan pengaruh sosialis. Kemenangan pasukan putih telah membawa

⁴⁶ 'History of Finland - Early Finnish Independence | Britannica' <<https://www.britannica.com/topic/history-of-finland/early-finnish-independence>> [accessed 13 June 2024].

⁴⁷ Ranja Hautamäki and Silja Laine, 'Heritage of the Finnish Civil War Monuments in Tampere', *Landscape Research*, 45.6 (2020), 742–57 <<https://doi.org/10.1080/01426397.2020.1749580>>.

dampak besar terhadap masyarakat di negara Finlandia, Ribuan anggota pasukan merah ditangkap, dan banyak dari mereka dihukum mati, sebab dari perang tersebut telah meninggalkan luka mendalam masyarakat Finlandia dengan ribuan orang tewas. Kemenangan Pasukan putih telah mengkonsolidasikan kekuasaan di tangan kaum konservatif dan nasional, kemudian menjadi negara sebagai anti-komunis, dengan kebijakannya berfokus pada penguatan militer dan keamanan internal untuk mencegah pemberontakan antara kaum konservatif dan sosialis dalam politik Finlandia untuk masa depan⁴⁸.

Hubungan Finlandia dan Rusia yang pada saat itu Uni Soviet terjadi pada Perang pertama, yang dimana keduanya mengalami ketegangan dinamika geopolitik yang kompleks. Ketika pada saat itu Finlandia mendeklarasikan kemerdekaannya dari Rusia pada 6 Desember 1917 langsung menghadapi berbagai tantangan domestik dan International⁴⁹. Uni Soviet saat itu mengalami Revolusi Bolshevik, secara resmi mengakui kemerdekaan Finlandia pada January tahun 1918, namun dalam pengakuan tersebut belum serta merta menyelesaikan ketegangan kedua negara. Hubungan kedua negara diwarnai oleh perjanjian, Konflik kecil, dan upaya konstan dari Finlandia untuk mempertahankan kedaulatannya serta menghindari pengaruh dari Uni Soviet⁵⁰.

Seperti contoh peristiwa penting yang mempengaruhi hubungan kedua negara yaitu Perang saudara Finlandia yang berlangsung dari januari hingga mei 1918.

Perang tersebut memperlihatkan pertentangan antara pasukan putih dan pasukan

⁴⁸ (Ibid)

⁴⁹ 'History of Finland - Early Finnish Independence | Britannica' <<https://www.britannica.com/topic/history-of-finland/early-finnish-independence>>.

⁵⁰ J. E. O. Screen, 'From Grand Duchy to a Modern State: A Political History of Finland since 1809, *Slavonic and East European Review*, 79.1 (2001) <<https://doi.org/10.1353/SEE.2001.0175>>.

merah, yang dimana pasukan putih terdiri dari kaum konservatif dan nasionalis yang didukung oleh Germany sedangkan pasukan merah yang berideologi sosialis dan mendukung Soviet Rusia⁵¹. Kemenangan pasukan putih dalam perang tidak hanya menentukan arah politik Finlandia ke depannya, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan dan permusuhan antara Finlandia dan Uni Soviet. Meskipun secara militer Finlandia berhasil mempertahankan kedaulatannya, dampak politik dan sosial dari perang saudara Finlandia berpengaruh pada hubungan antara kedua negara selama bertahun-tahun. Dari itu untuk menstabilkan hubungan tegang antara kedua negara ini, Finlandia dan Uni Soviet menandatangani perjanjian Tartu yang terjadi pada 14 Oktober 1920⁵².

Perjanjian Tartu, merupakan upaya diplomatik yang berfokus pada perbatasan antara kedua negara dan memberikan Finlandia wilayah Petsamo, yang memberikan akses strategis ke dalam Laut Barents. Dalam perjanjian tersebut telah berhasil meredakan ketegangan akan tetapi insiden perbatasan dan konflik tetapi terjadi, dikarenakan kedua belah pihak terus merasa curiga terhadap satu sama lain dengan masing-masing kedua pihak menganggap pihak lain sebagai ancaman yang kedepannya sangat berpotensi terhadap keamanan mereka. Dalam upaya untuk menjaga kedaulatannya dari menghindari pengaruh Soviet, Finlandia telah melakukan kebijakan Langkah, yaitu fokus memperkuat pertahanan nasional.

⁵¹ 'Finnish History' <<https://www.infofinland.fi/en/information-about-finland/finnish-history>>.

⁵² Suchoples, Jarosław, 'In the Shadow of the Eastern Neighbour. Finland in the Security Policy of Russia and the Soviet Union from Peter the Great to Contemporary Times', *Studia Europejskie - Studies in European Affairs*, 26.4 (2023), 9–38 <<https://doi.org/10.33067/se.4.2022.1>>.

Finlandia menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur pertahanan yang kuat, terutama wilayah perbatasan dengan Uni Soviet⁵³.

Perjanjian negara Finlandia dengan negara-negara eropa menjadi bagian penting dalam strategi untuk menjaga kedaulatannya untuk tetap berusaha untuk menjadi negara tetap netral, negara Finlandia tetap aktif dalam diplomasi international untuk membangun jaringan dukungan dan keamanan, Namun upaya telah banyak dilakukan, hubungan Finlandia dan Uni Soviet tetap rapuh, dikarenakan ketidakpercayaan yang mendalam dan perbedaan ideologis terus menjadi hambatan besar dalam hubungan bilateral, sebab disisi lain, Negara Uni Soviet melihat Finlandia sebagai pintu gerbang potensial dalam invasi barat ke wilayah mereka, sehingga mereka selalu memantau dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan Finlandia.⁵⁴

Secara keseluruhan, periode antar perang (1918-1939) merupakan masa sulit bagi Finlandia dalam mempertahankan kedaulatannya dan menghindari pengaruh Soviet. Meskipun terdapat berbagai perjanjian dan upaya diplomatik untuk mengurangi ketegangan, ketidakpercayaan dan konflik kecil masih terus terjadi. Melalui kebijakan luar negeri yang netral, pembangunan pertahanan yang kuat, dan upaya diplomasi yang cermat, Finlandia berhasil mempertahankan kedaulatannya selama masa sulit itu Namun, tantangan yang dihadapi Finlandia

⁵³ Pasi Tuunainen, ' Olli Vehviläinen, Finland in the Second World War. Between Germany and Russia . Translated by Gerard McAlester (Basingstoke: Palgrave, 2002). 199 Pp. ISBN 0-333-80149-0. ', *Scandinavian Journal of History*, 28.3-4 (2003), 328-30 <<https://doi.org/10.1080/03468750310001750>>.

⁵⁴ Max Jakobson, 'Reviewed Work: Finland, Germany and the Soviet Union, 1940-1941: The Petsamo Dispute. H. Peter Krosby', 85.4 (2016), 685-87.

dalam mempertahankan kemerdekaannya dari pengaruh Soviet mencerminkan dinamika geopolitik yang lebih luas di Eropa pada saat itu.

Pada tanggal 30 November 1939, Uni Soviet melakukan Invasi ke Finlandia perang ini dikenal sebagai Perang musim Dingin, yang terjadi beberapa bulan setelah pecahnya Perang Dunia II. Uni Soviet mengklaim bahwa serangan mereka hanya untuk mengamankan Leningrad dari ancaman potensial, meskipun banyak yang melihatnya sebagai upaya untuk memperluas wilayah Uni Soviet dan mengendalikan Finlandia. Invasi yang dilakukan Uni Soviet mengejutkan Finlandia, meskipun itu pihak Finlandia memberikan perlawanan yang sengit. Tentara Finlandia menggunakan taktik gerliya yang efektif, yaitu dengan memanfaatkan medan salju dan hutan lebat untuk menghambat kemajuan pasukan dari Uni Soviet, pertempuran perlawanan heroic Finlandia dikenal Pertempuran Suomussalmi dan Pertempuran Tolvajärvi⁵⁵.

Perang musim dingin berakhir pada 12 Maret 1940 dengan ditandatangani Perjanjian Damai Moskow⁵⁶. Negara Finlandia berhasil mempertahankan kemerdekaannya akan tetapi dalam perjanjian ini memiliki konsekuensi yaitu, Finlandia harus menyerahkan 11% wilayahnya kepada Uni Soviet, termasuk kota-kota penting Viipuri dan Sebagian besar Karelia. Selain itu Finlandia juga harus memberikan akses ke pangkalan militer di Hanko. Dalam perjanjian ini menyebabkan pemindahan sekitar 400.000 warga Finlandia diserahkan kepihak Uni Soviet. Ketidakpuasan yang dibuat perjanjian damai Moskow, membuat

⁵⁵ A Carl, 'N / A Marine Corps Combat Development Command The Winter War (1939-1940): An Analysis of Soviet Adaptation', 59.0704 (2020).

⁵⁶ 'History of Finland: A Selection of Events and Documents' <<https://histdoc.net/history/history.html>>.

Finlandia mencari aliansi baru, yang dimana ketika Operasi Barbarossa yang diluncurkan pihak Germany Nazi pada juni 1941, Finlandia melihat kesempatan untuk merebut wilayahnya yang hilang. Perang lanjutan dimulai ketika Finlandia bergabung dengan Pasukan Germany Nazi untuk melawan Uni Soviet. Selama perang berlanjut, Pasukan Finlandia berhasil merebut Kembali Sebagian besar wilayahnya yang hilang dan bahkan menguasai wilayah tambahan di Karelia Timur.⁵⁷

Pada tahun 1944, situasi militer di eropa mulai berubah secara drastic dengan kemajuan tentara Soviet yang signifikan di Front Timur, disisi lain negara Finlandia menyadari akan kekalahan dari negara Germany sudah hampir pasti kalah dan mulai mencari jalan keluar dari perang⁵⁸. Pada September 1944, Finlandia menandatangani gencatan senjata kepada pihak Uni Soviet yang mengakhiri Perang Lanjutan, dalam perjanjian ini mengharuskan Finlandia untuk menyerahkan Kembali wilayah yang telah direbutnya, serta memberikan kompensasi perang kepada Uni Soviet, dan juga Finlandia juga harus mengusir pasukan Germany dari wilayahnya. Dalam perjanjian ini menandai akhir dari upaya Finlandia untuk merebut Kembali wilayah yang hilang dan memaksa negara tersebut untuk beradaptasi dengan kenyataan geopolitik baru di eropa Pasca Perang⁵⁹.

⁵⁷ Ilkka Nummela Jari Eloranta, 'Unequal Partners : Germany and Finland during The', May, 2019.

⁵⁸ John I. Kolehmainen, ' Finland in Crisis, 1940-1941: A Study in Small-Power Politics . Anthony F. Upton ', *The Journal of Modern History*, 39.2 (1967), 206–206 <<https://doi.org/10.1086/240070>>.

⁵⁹ Allied Control Commission, 'Reviews of Books Miichte: Die Aussenpolitik Des Kuifiirstentums Bayern Von', 1986.

Setelah berakhirnya perang dunia II, negara Finlandia menggunakan kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai Pasivisme yang dimana Finlandia berusaha untuk tidak terlibat dalam blok militer manapun dan menjaga hubungan baik dengan semua negara, terutama tetangganya kuat yaitu negara Uni Soviet.⁶⁰ Kebijakan ini telah dirancang untuk menenangkan kekhawatiran Soviet sambil menjaga Finlandia untuk tetap bebas dari pengaruh ideologi Soviet.

Selama era perang dingin hubungan ekonomi dan perdagangan Finlandia dan Uni Soviet berkembang pesat, meskipun Finlandia negara demokratis, ia menandatangani berbagai perjanjian dengan pihak Uni Soviet yang menguntungkan, seperti komoditas produk kayu, logam, dan barang-barang manufaktur dari Finlandia, serta minyak dan bahan baku lainnya dari Uni Soviet. Hubungan ekonomi kedua negara ini sangat penting bagi stabilitas ekonomi di Finlandia dan juga berfungsi sebagai jembatan diplomatic antara Timur dan barat⁶¹. Salah satu tonggak penting dalam hubungan Finlandia dan Uni Soviet selama perang dingin adalah penandatanganan Pakta persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Timbal Balik (FCMA Treaty) yang dilakukan pada tahun 1948, yang berisi tentang menegaskan kembali terhadap kebijakan luar negeri Finlandia untuk netral dan komitmen untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan serangan terhadap Uni Soviet. Sebagai imbalannya, Uni Soviet harus menghormati kedaulatan Finlandia dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya. FCMA Treaty memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan politik dan militer

⁶⁰ Jukka Nevakivi, 'Finland and the Cold War', *Scandinavian Journal of History*, 10.3 (1985), 211–24 <<https://doi.org/10.1080/03468758508579064>>.

⁶¹ John H. Hodgson Roy Allison, 'Finland ' s Relations with the Soviet Union , 1944-84 . by Roy Allison Review by: John H . Hodgson', 46.2 (2014), 333–34 <<http://www.jstor.org/stable/2498943> .>.

di kawasan Nordik, memungkinkan Finlandia untuk tetap independen sambil menghindari ketegangan dengan Soviet⁶². Melalui kebijakan ini, Finlandia berhasil menavigasi tantangan era Perang Dingin dengan memanfaatkan diplomasi cerdas dan pragmatisme ekonomi.

Pada tahun 1991 terjadinya peristiwa runtuhnya negara besar yaitu Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet telah membawa perubahan besar bagi negara Finlandia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan uni Soviet selain itu Finlandia mengalami kebebasan dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya tanpa tekanan dari pihak timur, sehingga mendekati diri dengan Eropa barat dan Lembaga international lainnya⁶³. Salah satu Langkah terpenting Finlandia setelah runtuhnya uni soviet adalah integrasinya ke dalam Uni Eropa. Intergasi ini turut mengubah dinamika hubungan Rusia dan Finlandia, yang sebagai penerus Uni Soviet. Meskipun keanggotaan di UE telah memperkuat posisi ekonomi dan politik Finlandia, hal ini juga membawa tantangan baru terhadap hubungan Rusia, Khususnya terkait kebijakan luar negeri dan keamanan⁶⁴.

Setelah berakhirnya pasca era Uni Soviet, hubungan Finlandia dan Rusia ditandai oleh kombinasi Kerjasama dan konflik. Di satu sisi, kedua negara telah

⁶² Benoit Pelopidas and others, 'H-Diplo | Robert Jervis International Security Studies Forum: Roundtable Review 15-17', July, 2024, 1–13.

⁶³ David Arter, 'Scandinavian Politics Today: Second Edition', *Politics Today Scandinavian Politics Today*, 2013, 1–368.

⁶⁴ 'Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: A Case Study of Finland - Christopher S. Browning - Google Books' <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=aUr7TDC8x2MC&oi=fnd&pg=PA7&dq=constructivism+narrative+and+foreign+policy+analysis+a+case+study+of+finland&ots=BfU-fZW-hf&sig=alkQr5dqm1NvsVIVVHChjAWqUzQ&redir_esc=y#v=onepage&q=constructivism+narrative+and+foreign+policy+analysis+a+case+study+of+finland&f=false> [accessed 17 June 2024].

berkerja sama dalam berbagai bidang seperti perdagangan, energi, dan lingkungan. Finlandia tetap menjadi mitra dagang penting bagi Rusia, hubungan ekonomi antara kedua negara tetap kuat meskipun ada ketegangan politik sesekali. Namun, ada juga konflik dan ketegangan, terutama terkait dengan kebijakan keamanan regional dan ekspansi NATO di Eropa Timur. Finlandia, meskipun bukan anggota NATO, telah memperkuat kerjasamanya dengan aliansi tersebut, yang sering kali dilihat dengan curiga oleh Rusia. Secara keseluruhan, runtuhnya Uni Soviet memungkinkan Finlandia membentuk kebijakan luar negerinya dengan lebih bebas dan memperkuat posisinya di Eropa. Namun hal ini juga menghadirkan tantangan baru dalam menavigasi hubungan yang kompleks dengan Rusia di era pasca-Soviet. Meskipun kerja sama ekonomi yang erat masih terjalin, ketegangan politik dan keamanan masih menjadi bagian dari dinamika hubungan bilateral.

Hubungan politik dan diplomatic antara Finlandia dan Rusia saat ini ditandai oleh kompleksitas dan hati-hati, meskipun kedua negara berusaha mempertahankan hubungan diplomatic yang stabil, terdapat berbagai isu international dan regional sering kali menciptakan ketegangan. Negara Finlandia sebagai anggota Uni Eropa sering kali berkoordinasi kebijakan UE dalam menghadapi Rusia, seperti sanksi ekonomi yang diberlakukan aneksasi Krimea yang dilakukan Rusia pada tahun 2014. Dalam bidang ekonomi dan energi, hubungan Finlandia-Rusia tetap kuat meskipun ada tantangan, Rusia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Finlandia, dengan perdagangan bilateral yang mencakup berbagai sector, salah satunya energi, logam, dan produk. Finlandia

sangat bergantung pada impor gas alam dari Rusia untuk kebutuhan energinya, meskipun negara ini berupaya untuk mencoba mengurangi ketergantungan dari Rusia, Kerjasama energi ini sering kali menjadi batu ujian dalam hubungan bilateral, terutama ketika ada ketegangan politik yang meningkat.

Kedepannya, hubungan Finlandia Rusia akan menghadapi dan peluang baru. Tantangan terbesarnya mencakup stabilitas politik negara Kawasan baltik dan keamanan khususnya di Eropa timur, yang dimana Finlandia dan Rusia sering kali mempunyai kepentingan yang bertentangan. Selain itu, isu-isu seperti perubahan iklim dan perlindungan di Kawasan Artik memerlukan Kerjasama yang erat antara kedua negara. Di sisi lain, peluang muncul dari potensi peningkatan perdagangan dan investasi di bidang baru seperti teknologi dan inovasi. Mengingat kemajuan teknologi dan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim, kedua negara mempunyai peluang untuk memperdalam kerja sama di bidang-bidang ini. Secara keseluruhan, hubungan Finlandia dan Rusia saat ini terus berkembang dengan dinamika yang kompleks. Meskipun terdapat tantangan besar seperti masalah keamanan dan politik, terdapat juga peluang untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan diplomatik. Keberhasilan hubungan ini akan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk beradaptasi terhadap perubahan global dan mempertahankan dialog yang konstruktif.

2.3 Netralitas Finlandia

Netralitas adalah kebijakan atau posisi suatu negara yang memilih untuk tidak memihak dalam konflik militer atau politik antar negara lain. Dalam konteks internasional, netralitas berarti tidak bergabung dengan aliansi militer, tidak

memberikan bantuan militer kepada negara-negara berkonflik, dan mempertahankan posisi independent dalam diplomasi dunia. Konsep tersebut sering dikaitkan dengan upaya menjaga perdamaian dan stabilitas serta melindungi kepentingan nasional tanpa terlibat dalam konflik internasional yang dapat mengancam keamanan atau kesejahteraan suatu negara⁶⁵. Netralitas juga mencakup penolakan untuk bergabung dengan blok militer atau perjanjian pertahanan seperti NATO, lebih memilih untuk mengandalkan kebijakan pertahanan independen dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik.

Konsep netralitas juga memiliki landasan hukum internasional yang kuat. Negara-negara yang mengadopsi netralitas sering kali menegaskan posisi mereka melalui pernyataan resmi atau perjanjian internasional. Contohnya, Konvensi Den Haag 1907 menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewajiban negara netral selama konflik bersenjata. Selain itu, netralitas dapat memainkan peran penting dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana negara-negara netral dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam upaya resolusi konflik⁶⁶. Namun, penerapan netralitas tidak selalu mudah. Negara-negara netral harus mampu menavigasi hubungan diplomatik yang kompleks dan sering kali menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkonflik. Mereka juga harus mengelola tantangan internal, termasuk pendapat publik dan dinamika politik domestik yang dapat mempengaruhi kebijakan netralitas. Oleh karena itu,

⁶⁵ Evelina Padmasari Wiranto, 'Tinjauan Hukum Internasional Tentang Konsep Netralitas Dalam Deklarasi Kuala Lumpur 1971', 1971.

⁶⁶ Arlina Permasari, 'Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum Dan Kebiasaan Perang Di Darat', *Jurnal Hukum Humaniter*, 1.1 (2005), 184-97 <<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/teras-Lrev/article/view/5394/4257>>.

netralitas memerlukan kebijakan luar negeri yang cermat dan strategi diplomasi yang efektif untuk mempertahankan posisi yang netral sambil tetap melindungi kepentingan nasional.

Netralitas Finlandia merupakan contoh menarik bagaimana sebuah negara dapat mempertahankan posisi netral dari tengah dinamika geopolitik yang rumit. Setelah mengalami konflik berat dengan Uni Soviet selama Perang Dunia II, Finlandia memilih untuk mengadopsi kebijakan netralitas yang ketat sebagai cara untuk mengamankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Kebijakan ini tercermin dalam berbagai perjanjian dan kebijakan luar negeri yang menekankan pentingnya tidak berpihak dalam blok militer manapun, baik itu NATO atau Pakta Warsawa. Kebijakan ini dikenal bernama “*Finlandisasi*” yang dimana Finlandia berhasil menjaga kemerdekaan dengan berhati-hati menyeimbangkan hubungan dengan kekuatan besar disekitarnya. Karena setelah perang dunia II selesai, Finlandia menandatangani Perjanjian Paris 1947 yang mengakhiri statusnya sebagai negara yang ikut berperang dan memulihkan hubungan diplomatiknya⁶⁷. Selain itu juga, telah terjalannya Trakat persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama Uni Soviet pada tahun 1948 memperkuat komitmen Finlandia untuk tidak menjadi bagian dari aliansi militer yang dapat dianggap sebagai ancaman oleh Uni Soviet.

Selama perang dingin terjadi, netralitas Finlandia telah diuji oleh ketegangan antara blok barat dan Timur, akan tetapi Finlandia berhasil memanfaatkan posisinya sebagai negara netral yang berperan sebagai mediator dalam diplomasi internasional, salah satu menjadi tuan rumah berbagai pertemuan penting seperti

⁶⁷ Risto E.J. Penttila, *Finland ' S Security in a Changing Europe*, 1994.

konferensi keamanan dan Kerjasama di eropa (CSCE) pada tahun 1975 yang menghasilkan kesepakatan Helsinki⁶⁸. Pada masa pasca perang dingin, negara Finlandia mempertahankan kebijakan netralitasnya meskipun bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995. Keanggotanya Finlandia membawa kerangka kerja politik dan ekonomi yang lebih besar, akan tetapi tetap menolak untuk menjadi anggota NATO, Finlandia tetap berpartisipasi dalam program kemitraan perdamaian NATO. Netralitas Finlandia juga mencerminkan kehati-hatian dalam kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan semua negara tetangga, termasuk rusia, yang menjadi faktor penting dalam keamanan regional. Meskipun ada tekanan dari berbagai pihak domestik dan internasional, kebijakan netralitas Finlandia telah berhasil menjaga stabilitas dan keamanan negara selama beberapa dekade⁶⁹.

Pengalaman Finlandia selama Perang Dunia II telah berpengaruh terhadap kebijakan netralitasnya, yang dimana terjadi Invasi Uni Soviet pada tahun 1939 peristiwa dikenal sebagai perang musim dingin. Finlandia terlibat dalam konflik yang berakhir dengan kehilangan sebagian wilayahnya. Perang ini menunjukkan kerentanan Finlandia terhadap ancaman dari tetangga yang lebih kuat dan membentuk pandangan bahwa kebijakan luar negeri yang bijaksana dan netral adalah kunci untuk kelangsungan negara. Pengalaman pahit selama perang dunia II memperkuat tekad Finlandia untuk menghindari keterlibatan dalam aliansi militer di masa depan. Kebijakan netralitas pasca-perang dirancang untuk

⁶⁸ 'Helsinki Accords | Cold War Diplomacy & Impact on International Relations | Britannica' <<https://www.britannica.com/event/Helsinki-Accords>> [accessed 18 June 2024].

⁶⁹ Teija Tapio Raunion, Tiilikainen, *Finland in The European Union*, 2003.

mencegah pengulangan konflik dengan tetangga yang lebih kuat dan memastikan bahwa Finlandia tidak akan menjadi medan perang dalam konflik besar berikutnya. Kesadaran ini menjadi dasar dari kebijakan luar negeri Finlandia selama Perang Dingin dan seterusnya.

Perjalanan negara Finlandia menjadi negara Netralitas tidak luput dari perjanjian Paris 1947, Perjanjian ini mengakhiri status Finlandia sebagai negara yang berperang dan harus memulihkan hubungan diplomatic dengan kekuatan besar, termaksud Uni Soviet. Dalam perjanjian tersebut Finlandia setuju untuk membayar reparasi perang kepada Uni Soviet dan negara lain yang terkena efek dampak perang serta mematuhi batasan angkatan bersenjata, dan juga harus mengakui perbatasan baru Finlandia sebagai bentuk upaya untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Uni Soviet. Finlandia menandatangani Traktat Persahabatan, Kerjasama, dan Bantuan Bersama dengan Uni Soviet pada tahun 1948⁷⁰. Traktat ini dikenal sebagai "*Pact of Friendship*," dan merupakan perjanjian bilateral yang menetapkan kerangka kerja bagi hubungan antara kedua negara. Traktat ini mencakup berbagai aspek, termasuk kerjasama ekonomi, kebijakan luar negeri, dan keamanan. Melalui dalam traktat ini telah memberikan penting dalam menjaga hubungan antara Finlandia dan Uni Soviet selama perang Dingin, dan juga memberikan Finlandia ruang untuk mengembangkan kebijakan luar negeri yang indenpenden⁷¹. Namun, traktat ini juga menuntut kehati-hatian dalam kebijakan domestik dan luar negeri Finlandia untuk menghindari provokasi

⁷⁰ 'Finland - Postwar Economy, Arctic Region, EU Member | Britannica' <<https://www.britannica.com/place/Finland/The-postwar-period>>.

⁷¹ 'Finland (07/05)' <<https://2009-2017.state.gov/outofdate/bgn/finland/50290.htm>>.

terhadap Uni Soviet. Meskipun demikian, Finlandia berhasil memanfaatkan perjanjian ini untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaannya sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Barat. Melalui dari kebijakan ini Finlandia dapat mampu menjaga stabilitas dan keamanan nasionalnya di tengah-tengah persaingan geopolitik yang intens selama Perang Dingin. Kebijakan ini tidak hanya melindungi Finlandia dari ancaman eksternal tetapi juga memungkinkan negara ini untuk berperan aktif dalam diplomasi internasional dan upaya perdamaian global⁷².

Pada tahun 1995 Finlandia bergabung dengan Uni Eropa setelah referendum yang menunjukkan dukungan mayoritas rakyat Finlandia untuk keanggotaan, bergabungnya Finlandia dengan menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri, akan tetapi tidak mengubah komitmen dasar negara terhadap netralitasnya. Keanggotaan Uni Eropa memberikan negara Finlandia bisa akses ke pasar tunggal Eropa serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan, namun Finlandia tetap mempertahankan kebijakan netralitas dalam urusan militer dan keamanan⁷³.

Sebagai anggota Uni Eropa, Finlandia memainkan peran aktif dalam berbagai inisiatif dan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat integrasi Eropa dan berkomitmen terhadap nilai-nilai dan tujuan Uni Eropa, promosi perdamaian, stabilitas, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, Finlandia tetap berhati-hati untuk memastikan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan Bersama Uni Eropa

⁷² 'Neutral European Countries' <<http://nato.gov.si/eng/topic/national-security/neutral-status/neutral-countries/>>.

⁷³ 'The Changing Concept of Finland's Neutrality - Danube Institute' <<https://danubeinstitute.hu/en/research/the-changing-concept-of-finland-s-neutrality>>.

tidak bertentang dengan prinsip-prinsip netralitasnya. Keanggotaan Finlandia dan Uni Eropa juga telah mencerminkan komitmen negara terhadap multilateralisme dan Kerjasama International, yang dimana ikut turut berpartisipasi dalam berbagai proyek yang bertujuan untuk memperkuat Kerjasama regional dalam bidang keamanan, lingkungan, dan energi⁷⁴. Dalam konteks ini, netralitas Negara Finlandia tidak terlihat sebagai hambatan, akan tetapi sebagai aset negara yang memungkinkan untuk sebagai mediator yang dipercaya dalam berbagai isu international.

Berakhirnya perang dingin menimbulkan Kebijakan Luar Negeri Finlandia menghadapi tantangan dan peluang baru yang setelah jatuhnya negara Uni Soviet, membuat Finlandia untuk menyesuaikan kembali kebijakan luar negeri sambil tetap mempertahankan netralitasnya menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara negara barat, sementara harus tetap menjaga hubungan baik dengan rusia yang menjadi pewaris utama dari negara Uni Soviet. Selain mengikuti menjadi anggota Uni Eropa, Finlandia juga aktif dalam organisasi international seperti PBB, OSCE, Dewan Nordik. Partisipasi dalam organisasi tersebut memungkinkan Finlandia untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya sambil berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan global, seperti operasi perdamaian tanpa melanggar terhadap prinsip netralitasnya⁷⁵. Kebijakan luar negeri Finlandia juga menekankan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai alat utama untuk

⁷⁴ Ian Manners, 'European Union "Normative Power" and the Security Challenge', *European Security*, 15.4 (2006), 405–21 <<https://doi.org/10.1080/09662830701305880>>.

⁷⁵ Teemu Palosaari, *The Art of Adaptation : A Study on the Europeanization of Finland's Foreign and Security Policy*, 2011.

menyelesaikan konflik dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan proliferasi senjata nuklir.

Salah satu aspek paling menonjol dari kebijakan netralitas yang diterapkan negara Finlandia di era modern adalah hubungan bersama NATO. Meskipun memiliki hubungan banyak negara dari anggota NATO, Negara Finlandia tetap memilih untuk menjadi anggota penuh dari aliansi tersebut, dikarenakan keputusan didasari oleh berbagai faktor yang mencerminkan komitmen Finlandia terhadap netralitas dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas regional. Finlandia telah berpartisipasi mengikuti program kemitraan untuk perdamaian yang dipimpin oleh organisasi NATO tahun 1994. Melalui program ini, Finlandia terlibat dalam berbagai latihan militer dan inisiatif kerjasama yang dirancang untuk meningkatkan interoperabilitas dan kapabilitas pertahanan, sebab Finlandia melihat PfP sebagai cara untuk memperkuat kemampuan pertahanannya sambil tetap mempertahankan kebijakan netralitas⁷⁶.

Alasan utama negara Finlandia menolak untuk menjadi anggota NATO adalah untuk menjaga hubungan dengan Rusia, sebagai negara tetangga yang besar dan berpengaruh. Dengan bergabung sama NATO bisa dilihat sebagai tindakan provokasi oleh pihak negara Rusia dan dapat mengakibatkan ketegangan. Selain itu ada juga pertimbangan yang mempengaruhi opini public negara Finlandia cenderung mendukung kebijakan netral yaitu mereka merasa bahwa bergabung dengan NATO tidak sesuai dengan tradisi negara mereka sebagai negara netral.

⁷⁶ Tuomas Forsberg and Tapani Vaahtoranta, 'Inside the EU, Outside NATO: Paradoxes of Finland's and Sweden's Post-neutrality', *European Security*, 10.1 (2001), 68–93 <<https://doi.org/10.1080/09662830108407483>>.

Namun, meskipun menolak keanggotaan penuh, Finlandia tetap berkomitmen untuk berkerjasama dengan NATO dalam berbagai misi-misi perdamaian termaksud di Afghanistan dan Balkan, serta berkontribusi dalam upaya-upaya yang bertujuan untuk memperkuat keamanan global. Dengan cara tersebut, Finlandia dapat menjaga kebijak netralitasnya sambil tetap berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas international⁷⁷.

Secara konsisten Finlandia telah mengimplemntasikan kebijakan netralitasnya dalam konflik international, yaitu konflik yang terjadi di ukriana tahun 2014. Ketika Rusia menganeksasi Krimea dan mendukung pemberontakan separatis di ukarina timur, banyak negara barat memberlakukan sanksi terhadap rusia dan memberikan dukungan militer kepada Ukraine. Namun, Finlandia mengambil pendekatan yang lebih hati-hati meskipun Finlandia mengutuk aneksasi Krimea sebagai pelanggaran hukum dan mendukung sanksi yang diberlakukan oleh Uni Eropa terhadap rusia, namun negara Finlandia tetap menjaga hubungan mereka dengan rusia⁷⁸. Finlandia terus terlibat dalam dialog diplomatic dengan rusia serta memanfaatkan posisi netralnya untuk mendorong penyelesaian damai atas konflik tersebut kedalam berbagai forum international, seperti PBB, Organisasi untuk keamanan dan Kerjasama di eropa(OSCE), yang disini menekankan pentingnya dialog dan diplomasi sebagai cara utama untuk menyelesaikan konflik.

Finlandia juga telah berpartisipasi secara aktif dalam misi perdamaian dari Peserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) yang ada di Lebanon yang dikenal sebagai

⁷⁷ Ibid

⁷⁸ Hiski Haukkala, 'From Cooperative to Contested Europe? The Conflict in Ukraine as a Culmination of a Long-Term Crisis in EU–Russia Relations', *Journal of Contemporary European Studies*, 23.1 (2015), 25–40 <<https://doi.org/10.1080/14782804.2014.1001822>>.

UNIFIL(*United Nations Interim Force In Lebanon*) pada tahun 1978. Yang dimana negara Finlandia telah mengirimkan pasukannya untuk membantu menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut. Pasukan Finlandia terlibat dalam berbagai tugas, seperti patrol, pengawasan gencatan senjata, dan serta juga bantuan kemanusiaan⁷⁹. Partisipasi Finlandia dalam misi ini menunjukkan komitmen negara tersebut terhadap perdamaian dan stabilitas regional tanpa memihak dalam konflik yang sedang berlangsung.

Kebijakan Netral yang diterapkan Finlandia memiliki tantangan dan Kontroversi salah satunya pengaruh geopolitik dan keamanan regional yang telah memainkan peran penting dalam kebijakan netral terhadap Finlandia. Sebab letak geografis Finlandia berbatasan langsung dengan rusia, yang dimana posisi sangat sensitive dalam dinamika keamanan eropa. Ketika ketegangan Rusia dan negara-negara barat, tepatnya aneksasi Krimea oleh rusia pada tahun 2014, telah membuat tekanan Finlandia untuk menyesuaikan kebijakan keamanannya tanpa meninggalkan prinsip netralitasnya. Meskipun Finlandia telah memperkuat kerjasamanya dengan Uni Eropa dan NATO, mereka tetap menjaga kebijakannya sebagai negara netral untuk menghindari provokasi terhadap Rusia dan menjaga stabilitas regional.

Adapun terdapat kritik dan Dukungan Domestik terhadap Kebijakan Netralitas yang diterapkan oleh negara Finlandia telah membuat stigma buruk masyarakat disana mengenai Netralitas Finlandia. Banyak warga Finlandia netralitas sebagai

⁷⁹ 'UN Thanks Finland for Its Contribution to Peacekeeping - United Nations Western Europe' <<https://unric.org/en/un-thanks-finland-for-its-contribution-to-peacekeeping/>> .

cara untuk menjaga perdamaian serta stabilitas negara mereka, namun ada juga kritik yang menyatakan bahwa membuat Finlandia rentan terhadap ancaman keamanan dari negara agresif dan mengurangi kemampuan negara untuk berpartisipasi secara penuh dalam sistem pertahanan kolektif barat⁸⁰. Dalam pedebatan ini telah mencerminkan keseimbangan antara keinginan untuk mempertahankan tradisi netralitas mereka dan kebutuhan untuk menyesuaikan dengan realitas keamanan yang berubah.

Banyaknya negara dan organisasi International menghormati posisi netral negara Finlandia serta menghargai kontribusi negara dalam upaya perdamaian terhadap stabilitas global, yaitu partisipasi Finlandia dalam misi perdamaian PBB dan Kerjasama international menunjukkan bahwa netralitas tidak menghalangi Finlandia untuk berperan aktif dalam komunitas international. Namun, ada juga negara melihat kebijakan netralitas Finlandia sebagai sikap yang amat kurang tegas dalam menghadapi ancaman keamanan global, Khususnya kasus dari negara Rusia. Meskipun demikian, Finlandia terus berupaya untuk tetap menjaga keseimbangan menjaga hubungan baik dengan tetangganya melalui Kerjasama international yang tidak melibatkan komitmen militer formal.

⁸⁰ 'Finlandisasi: Menjadi Netral Ala Finlandia' <<https://tirto.id/finlandisasi-menjadi-netral-ala-finlandia-grlQ>>.